12

MANUSIA SEBAGAI "ANIMAL SYBOLICUM"
FILSAFAT KEBUDAYAAN ERNST CASSIRER (1874-1945)

Oleh :
Dr. Zainal Abidin, M.Si

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PADJADJRAN
BANDUNG, DESEMBER 2009

10

MANUSIA SEBAGAI "ANIMAL SYBOLICUM"
FILSAFAT KEBUDAYAAN ERNST CASSIRER (1874-1945)

Oleh :
Dr. Zainal Abidin, M.Si

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PADJADJRAN
BANDUNG, DESEMBER 2009

TELAH DICATAT/DIDOKUMENTASIKAN PADA
PERPUSTAKAAN FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Kepala Perpustakan

Dr. Ratna Jatnika, MT
NIP. 19632021988032003

Telah diperiksa oleh :
Guru Besar/Dosen Senior

Prof.Dr. Hj. Kusdwiratri Setyono

Mengetahui :
Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Padjadjaran

Prof.Dr.Hj.Juke Roosjati Siregar, M.Pd
NIP.1947111819032001

KETUA BAGIAN PSIKOLOGI KLINIS

Drs. H.Hatta Albanik, M.Psi
NIP.194705121981031001

Mengetahui :
Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Padjadjaran

Prof.Dr.Hj.Juke Roosjati Siregar, M.Pd
NIP.1947111819032001

Terdaftar di Perpustakaan
Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran

SEMINAR DUA HARI TENTANG
"PSIKOLOGI DALAM PEMERINTAHAN"
Hotel Borobudur Jakarta, 4-5 April 2007

MENCEGAH AKSI-AKSI ANARKIS DI INDONESIA

Oleh:
Dr. Zainal Abidin
Staf Pengajar Fakultas Psikologi UNPAD Bandung

Maraknya aksi-aksi massa berskala besar sampai kecil di sejumlah wilayah di tanah air sejak menjelang runtuhnya kekuasaan Orde Baru (Mei 1998) hingga dewasa ini, telah memunculkan sejumlah pertanyaan berikut ini: Apa sebetulnya sebab musabab terjadinya aksi-aksi massa tersebut? Apa saja karakteristik psikologis yang dimiliki oleh para pelaku aksi massa tersebut? Bagaimana kondisi psikologis para pelaku di dalam massa? Mengapa sejumlah anggota massa dapat melakukan aksi-aksi anarkis dan destruktif (melakukan kerusuhan, pengrusakan, bahkan pembunuhan)?. Di samping itu, muncul pula pertanyaan yang berkaitan dengan upaya-upaya penanggulangan aksi-aksi massa: Bagaimana mengelola dan menghentikan aksi-aksi massa yang destruktif dan anarkis? Apakah melalui cara-cara persuasif atau represif?

Tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun, sebelum itu perlu dijelaskan terlebih dulu secara teoritis pengertian massa, jenis-jenis dan karakteristik-karakteristiknya.

Apakah massa itu sebenarnya?

Makna atau arti istilah "massa" dalam bahasa Indonesia, sama dengan istilah *crowd* (kerumunan orang) dalam diskursus sosiologi dan psikologi sosial. Massa (atau, *crowd*) biasanya didefinisikan sebagai sekerumunan orang di suatu tempat tertentu dan waktu tertentu dan memiliki perhatian yang relatif sama pada objek atau peristiwa tertentu. Keberadaan mereka di tempat dan waktu yang sama tersebut pada umumnya

bersifat sangat sementara, tidak permanen. Kalaulah keberadaan mereka di tempat itu relatif permanen (misalnya, kerumunan buruh di suatu pabrik yang sedang berdemonstrasi di lingkungan pabrik mereka), mereka pada saat itu berada dalam suasana psikologis yang relatif sama (misalnya: kecewa atau marah pada pemilik pabrik atau manajemen pabrik) dan memiliki perhatian pada objek atau peristiwa yang sama (misalnya sedang memperjuangkan hak-hak mereka dan minta perhatian pemilik atau manajemen pabrik).

Menurut beberapa sosiolog (misalnya DiRenzo, 1990; Johnson, 1986) dan psikolog sosial (misalnya Young, 1958; Milgram & Toch, 1969; Richer 2002), aktivitas massa sebetulnya tidak identik dengan kekerasan. Artinya, suatu massa belum tentu melakukan kekekasan atau aksi-aksi anarkis dan destruktif. Emosi yang dialami oleh anggota massa pun tidak selalu negatif (bermusuhan, marah, kecewa, dll). Bahkan, dalam banyak kasus, para anggota suatu massa bisa mengalami perasan suka ria luar biasa (*joyful emotion*), seperti yang tampak pada massa yang sedang merayakan kemenangan kesebelasan sepak bola yang dijagokan oleh mereka. Kalaulah suatu massa sudah bersifat sangat emosional (ditandai oleh perasaan marah, bermusuhan, dendam) dan anarkis (melakukan kekerasan atau perusakan yang bersifat kolektif), maka massa seperti itu dinamakan *mob* dan/atau *riot*.

Dengan demikian, kita perlu membedakan massa dalam dua kategori berikut ini, yakni massa yang melakukan dan yang tidak melakukan kekerasan. Akan tetapi, yerlepas dari melakukan atau tidak melakukan aksi-aksi kekerasan, pada umumnya apa yang dimakan massa memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) para anggotanya berada di tempat yang sama dan secara fisik mereka sangat berdekatan (berkerumun), (b) waktu berkerumunnya dalam massa tidak permanen *(temporary)*, (c) memiliki fokus yang sama atau memberi respons yang relatif sama terhadap sasaran atau peristiwa tertentu, (d) suasana emosi mereka relatif seragam dan lebih dominan dibanding kognisi atau rasionya, (e) kurang terorganisir atau sulit diorganisir, (f) tidak ada penentuan/pembagian peran dan tugas yang tegas di antara para anggotanya, dan (g) seringkali muncul pemimpin yang bersifat informal.

Beberapa contoh kerumunan orang yang dapat dikategorikan sebagai massa, antara lain adalah:

- Penonton pertandingan sepak bola
- Penonton pertunjukan musik
- Kerumunan anggota atau partisipan suatu demonstrasi (misalnya, para demonstran yang menentang UU anti-pornografi dan porno aksi; demonstran menentang dan/atau mendukung (revisi) UU No 37 Tahun 2006; demonstrasi yang dilakukan oleh para penumpang KA Rangkas Bitung – Jakarta (15 Maret 2007), Demonstrasi PT Dirgantara Indonesia, dan lain-lain)
- Catatan: demonstrasi yang dilakukan oleh para guru, oleh para kepala desa, dan oleh sejumlah anggota DPRD beberapa waktu lalu – dapat dikategorikan sebagai massa juga.

Mob adalah salah satu bentuk dari massa yang sangat emosional dan bertindak agresif serta anarkis terhadap sasaran atau objek tertentu secara langsung (Young, 1958; Brown, 1969). Orang-orang yang berada dalam *mob* memiliki rasa permusuhan dan amarah yang sangat kuat dan dapat mengekspresikan amarah dan permusuhan tersebut pada objek-objek atau sasaran-sasaran tertentu (baik orang maupun harta benda). Tingkah laku mereka terarah hanya pada satu tujuan, yakni menyerang dan membahayakan korban atau sejumlah korban tertentu, atau menghancurkan dan merusak harta benda orang lain.

Perlu dicatat bahwa seringkali terjadi suatu massa yang semula berupa massa yang damai (misalnya, demonstrasi tanpa kekerasan) berubah menjadi *mob* (massa yang melakukan kekerasan). Pemicunya bisa berupa peristiwa atau kejadian yang sangat sepele, misalnya karena ada teriakan yang bernada emosional dan agresif dari satu atau beberapa anggota massa seperti "serang", "bakar", atau tindakan-tindakan yang dapat memotivasi anggota massa lainnya untuk menyerang dan menghancurkan. Perubahan dari massa yang damai ke massa yang anarkis pun dapat dipicu oleh provokasi dari orang-orang yang menjadi "lawan" dari massa tersebut (atau, orang-orang yang menjadi sasaran demonstrasi), atau oleh pihak ketiga yang dipersepsi tidak adil oleh massa

(misalnya, tindakan polisi terhadap demonstran atau keputusan wasit dalam pertandingan sepak bola).

Sebagai salah satu bentuk dari massa, riot pada dasarnya sama dengan mob, yakni melakukan aksi-aksi kekerasan dan anarkis. Emosi para anggota riot pun pada umumnya dikuasai oleh amarah dan permusuhan, meski tidak jarang diantara mereka ada yang senang karena dapat memanfaatkan situasi untuk kepentingan mereka. Namun, berbeda dari mob, aksi-aksi riot biasanya berskala lebih luas, menyebar secara tak terkendali, jangka waktu kekerasannya lebih lama, kurang terarah, dan seringkali tidak memiliki pemimpin. Aksi-aksi kekerasannya dilakukan tanpa membeda-bedakan karakteristik korban (DiRenzo, 1990). Sejauh korban dianggap memiliki kesamaan (baik fisik maupun non-fisik) dengan lawan atau sasaran mereka, maka mereka dan harta benda mereka dapat menjadi korban penyerangan. Alasan para partisipan terlibat dalam *riot* pun berbeda-beda: menciptakan huru-hara, mendapatkan keuntungan ekonomi, melampiaskan kemarahan dan frustrasi, dll. Oleh sebab itu, tingkah laku orang-orang dalam *riot* mungkin berbeda-beda (misalnya: menjarah, memperkosa, menyiksa, membuat keonaran, dll), meski pada hakekatnya sama, yakni kasar, destruktif, dan membahayakan orang atau kelompok lain.

Disebabkan oleh ciri-cirinya tersebut, *riot* lebih membahayakan dibandingkan *mob* (Johnson, 1986),. Karena jarang ada pemimpin yang mengarahkan dan mengendalikan, dan tidak ada sasaran atau tujuan yang jelas dan terfokus, *riot* sangat sulit untuk dihentikan. Riot yang terjadi di Perancis tahun 2005 lalu, misalnya, berlangsung hingga 11 hari; riot di Jakarta bulan Mei 1998 terjadi berhari-hari (13-15 Mei). Polisi bisa mengendalikan *mob* secara lebih cepat, misalnya dengan cara membujuk, menembakkan senjata api ke udara, memukul, atau menangkap pemimpinnya. Namun, sekali *riot* dimulai, sulit untuk dihentikan tanpa menggunakan kekerasan balik, atau bahkan lebih keras dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh para pelaku *riot*. Akibatnya, seringkali kekerasan yang dilakukan polisi justru semakin menambah amarah anggora *riot* dan meningkatkan kekerasan balasan dari mereka.

Kecuali dalam riot, pada umumnya terdapat seorang atau beberapa orang individu dalam massa (termasuk *mob)* yang secara informal berfungsi sebagai pemimpin. Tugas mereka biasanya adalah mengarahkan intensi dan emosi orang-orang disekitarnya pada tujuan atau sasaran tertentu. Mereka menggunakan slogan-slogan, teriakan-teriakan, pidato-pidato, atau ungkapan-ungkapan bermuatan emosional untuk merangsang dan meningkatkan emosi orang-orang yang berada dalam massa. Slogan-slogan dan teriakan-teriakan tersebut berfungsi untuk memberikan justifikasi terhadap perasaan-perasaan dan aksi-aksi anggota massa.

Yang dimaksud dengan pemimpin dalam massa tidak selalu berarti orang yang sengaja dipilih oleh anggota massa. Pemimpin bisa berarti orang yang dianggap sebagai model dan sebagai model mereka mungkin saja tidak bermaksud memimpin suatu massa. Hal ini terjadi misalnya dalam suatu *mob* yang bersifat agresif dan spontan. Orang pertama yang mempunyai inisiatif untuk melakukan penyerangan atau perusakan akan dijadikan model (pemimpin) oleh orang-orang yang berada dalam kerumunan. Sekali serangan dimulai, maka akan diikuti atau ditiru oleh orang-orang yang secara potensial sedang marah dan kecewa, baik terhadap sasaran awalnya maupun terhadap hal lain yang sebetulnya tidak berhubungan dengan sasaran awal.

Menurut DiRenzo (1990) dan Young (1956), pada umumnya dalam setiap *mob* terdapat seorang atau beberapa orang pemimpin yang berfungsi meningkatkan semangat, prestise, dan rasa berkuasa pada para anggota. Prestise dan rasa berkuasa sangat dibutuhkan oleh para anggota yang umumnya berasal dari masyarakat kelas bawah. Karena dalam kehidupan sehari-hari mereka mengalami banyak tekanan hidup, merasa dipinggirkan dan dimarginalkan secara sosial dan politik, merasa "kalah" dan tersisih, maka mereka mengkompensasikan perasaan tersebut dalam aksi-aksi anarkis.

Komposisi massa

Dalam suatu massa yang anarkis (mob dan riot), tidak semua anggotanya melakukan aksi-aksi anarkis dan destruktif. Sebagian di antara mereka mungkin hanya menjadi penonton pasif, dan sebagian lagi hanya berteriak-teriak memberi dukungan kepada pelaku serangan atau perusakan. Oleh sebab itu, sejumlah ahli kekerasan kolektif

membagi peserta mob dan riot ke dalam pelaku aktif, penonton pasif, dan suporter atau provokator. Terlepas dari perannya yang hanya menonton, keberadaan penonton pasif pun memiliki peran penting dalam memfasilitasi, memotivasi, dan membuat para pelaku aktif bertindak lebih liar dan beringas. Dalam psikologi sosial, gejala itu dinamakan *social facilitation*. Oleh sebab itu dapat dipahami, mengapa semakin besar jumlah orang dalam massa, sehingga makin besar pula jumlah penonton pasifnya, dan semakin besar pula kekuatan *social facilitation* dalam massa itu, maka semakin besar kemungkinan massa itu untuk melakukan akis-aksi anarkis.

Tujuan aksi massa

Secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan massa dan aksi-aksinya memiliki tujuan, yakni perubahan social. Para anggota massa dalam suatu demonstrasi atau protes, misalnya, menginginkan perubahan dari kondisi yang selama ini dinilai tidak menguntungkan (tidak adil) menjadi lebih baik. Ada kesepakatan sosial (kolektif) di antara mereka untuk menuntut atau melakukan perubahan. Aksi-aksi massa adalah sarana untuk menuntut atau melakukan perubahan itu.

Namun, tidak semua aksi massa bertujuan untuk perubahan sosial. Kerumunan para penonton bola atau penonton konser musik memang memiliki tujuan berada dalam suatu kerumunan (stadion olah raga atau gedung pertunjukan), tetapi bukan untuk perubahan sosial, melainkan demi kesenangan atau hiburan belaka.

Penggunaan kekerasan oleh massa pun seringkali memiliki tujuan, yakni untuk perubahan sosial. Manakala mereka merasa bahwa aksi-aksi massa yang dilakukan secara damai tidak membawa perubahan, maka dipilihlah kekerasan. Dengan demikian, kekerasan menjadi alat atau instrumen untuk perubahan sosial. Di Indonesia, hal ini misalnya pernah dilakukan oleh sejumlah organisasi mahasiswa menjelang runtuhnya kekuasaan Orde Baru (Mei 1998).

Namun, cukup banyak kasus aksi massa yang menggunakan kekerasan hanya sekedar untuk mengungkapkan amarah, frustrasi, permusuhan. Kekerasan bukan merupakan alat, melainkan sebagai ungkapan amarah dan kekecewaan. Misalnya,

kerusuhan penonton sepak bola. Dalam kasus ini, para pelaku biasanya melakukan kekerasan secara spontan karena kecewa atas keputusan wasit atau karena buruknya permainan kesebelasan favoritnya.

Oleh sebab itu, sejumlah ahli menggolongkan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh massa dalam dua kategori, yakni instrumental dan ekspresif atau hostile. Kasus kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah organisasi mahasiswa menjelang runtuhnya Orde Baru tadi adalah contoh kekerasan instrumental. Contoh kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepak bola adalah contoh kekerasan ekspresif atau hostile.

Namun, pada kenyataannya, banyak kasus yang merupakan gabungan dari kedua bentuk kekerasan tersebut. Contoh kekerasan massa yang merupakan gabungan antara instrumental dan ekspresif adalah demonstrasi yang mulanya dilakukan secara damai tapi karena tidak ditanggapi atau diprovokasi oleh sasaran demonstran, mereka lalu marah dan melakukan kekerasan atau penyerangan.

Mengapa aksi-aksi massa marak di Indonesia?

Ada gejala menarik dalam masyarakat kita, yakni merebaknya secara drastis aksi-aksi massa di berbagai daerah di tanah air. Para pelaku aksi massa pun berasal dari berbagai kalangan atau komponen masyarakat. Mulai dari komponen mahasiswa, buruh, petani, dan komponen rakyat lainnya bakan sampai pegawai negeri sipil (PNS), kepala desa, dan anggota DPRD. Isu-isu yang disuarakan oleh aksi-aksi massa tersebut beragam: penolakan/dukungan RUU tertentu, protes terhadap perlakuan tidak adil para pengusaha dan penguasa, penggusuran tanah, dan lain-lain. Pada saat rezim Orde Baru berkuasa, aksi-aksi massa sangat jarang dilakukan, antara lain karena penanganan yang sangat represif terhadap para pelaku aksi massa oleh petugas keamanan (polisi dan tentara). Aksi-aksi massa pada saat itu adalah alternatif akhir yang dipilih oleh rakyat, setelah upaya-upaya untuk menuntut perubahan tidak berhasil. Namun, sejak tahun 1998 hingga dewasa ini, aksi-aksi massa seolah-olah menjadi alternatif pertama, sebelum alternatif lain dipilih dan dilaksanakan.

Ada beberapa alasan (faktor) mengapa aksi-aksi massa menjadi marak di sejumlah daerah di Indonesia. Saya akan membaginya ke dalam dua kategori, yakni faktor non-psikologis dan psikologis.

Faktor non-psikologis

- Transisi sosial-politik paska jatuhnya kekuasaan politik Orde Baru dan belum kuatnya kekuasaan politik Orde Reformasi. Sejumlah kajian sosial-politik di Indonesia dan di sejumlah negara menunjukkan. pada saat suatu negara sedang mengalami perubahan (kekuasaan) politik menuju demokrasi, maka akan ada *vacuum of power* atau *powerless state*, yang berakibat pada menguatnya kekuatan rakyat, yang disertai oleh disorientasi, anomali, dan euforia sosial; gamangnya para pemimpin pemerintahan, karena belum memiliki pengalaman dalam mengelola negara. Aksi-aksi massa dan kekerasan-kekerasan massa di sejumlah wilayah di Indonesia merupakan salah satu akibat dari powerless state dan akibat-akibat turunannya tersebut.
- Dibuat dan diundangkannya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang tidak berpihak pada, dan seringkali merugikan, rakyat kecil (misalnya: UU Perburuhan tahun Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 78 dan 111 Tahun 2001; pemerintah membatalkan revisi Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK); munculnya sejumlah peraturan pemerintah pusat dan daerah yang kontroversial (misal: UU Anti Pornograpi dan Pornoaksi; PP No 37 tahun 2006; Perda Tangerang No 8/2005 (JRTPT8). Akibatnya, sebagian masyarakat mengalami kekecewan dan melakukan aksi-aksi massa[1].
- Tidak ada lagi lembaga atau tokoh formal dan informal yang bisa dipercaya oleh rakyat dan dapat menyuarakan tuntutan dan kebutuhan rakyat. Karena secara politik kekuasaan rakyat relatif kecil, dan akses ke kekuasaan tertutup bagi

[1] Pada kasus perburuhan masalahnya lebih kompleks lagi, karena yang dihadapi bukan hanya kebijakan pemerintah, tapi juga kebijakan pemilik perusahaan yang sering merugikan buruh dan karyawan)

mereka, maka aksi-aksi massa dinilai lebih efektif dalam menyampaikan tuntutan mereka.

- Kemiskinan dan pengangguran. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setelah jatuhnya Orde Baru jumlah orang miskin dan pengangguran semakin meningkat. Sebagian dari mereka kemudian melakukan aksi massa menuntut pemerintah untuk segera memperbaiki situasi ekonomi bangsa.
- Tuntutan ekonomi. Buruknya situasi ekonomi negara, bukun hanya mendorong masyarakat miskin dan pengangguran untuk melakukan aksi-aksi massa, tetapi sebagaian komponen masyarakat seperti guru, PNS, kepala desa pun melakukan aksi-aksi yang sama. Yang dituntut oleh mereka terutama adalah perbaikan kesejahteraan ekonomi.

Faktor psikologis:

- Frustrasi dan deprivation. Runtuhnya kekuasaan Orde Baru membawa harapan yang sangat besar untuk perbaikan hidup masyarakat. Namun, kenyataannya justru sebaliknya: kehidupan sosial, ekonomi, keamanan ternyata lebih buruk. Akibatnya, timbullah kekecewaan, frustrasi, deprivasi kolektif yang disertai oleh amarah dan dorongan untuk melakukan aksi-aksi massa, menuntut janji-janji reformasi.
- *Social learning*, khususnya *observational learning*. Aksi-aksi massa seperti demonstrasi, apalagi demonstrasi menggunakan kekerasan, sering dinilai sukses dalam mencapai tujuan, sehingga mendorong sejumlah anggota masyarakat lainnnya untuk meniru dan melakukan aksi-aksi yang sama. Bahkan, tanpa ada reward pun, aksi-aksi massa yang menggunakan kekerasan dapat dengan cepat menular. Ini tampak dari kasus-kasus kekerasan massa, terutama kasus penghakiman massa (Abidin, Z., 2005). Cukup dengan tidak adanya punishment (tuntutan atau pembalasan secara hukum) terhadap pelaku kekerasan,

pembantaian terhadap para penjahat seolah-olah merupakan "reward" tersendiri[2]. Akibatnya, aksi-aksi massa kemudian menjadi pilihan utama untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan, yakni merubah keadaan (social change).

- *Perceived injustice*. Para pelaku aksi massa pada umumnya mengalami rasa diperlakukan tidak adil. Kebijakan pemerintah dinilai sering menguntungkan pihak tertentu tapi merugikan pihak lain. Dalam kasus perburuhan, gejala seperti itu tampak sangat jelas dan transparan: Jika ada perselisihan antara buruh dengan manajemen atau pemilik perusahaan, maka pemerintah sering berada di pihak pemilik perusahaan. Akibatnya, aksi-aksi massa yang dilakukan oleh buruh sering diarahkan pada pemilik perusahaan dan kebijakan pemerintah, karena mereka menilai bahwa kedua pihak tersebut berlaku tidak adil dan merugikan buruh.

Mengapa massa bertindak anarki?

Pertanyaan yang sering muncul dalam pikiran kita adalah: Mengapa bisa terjadi suatu massa yang semula damai lalu berubah menjadi massa yang beringas, liar, dan anarkis?

Seorang ahli psikologi sosial dari Perancis bernama LeBon (*original*:1895; 1999), mendeskripsikan massa sebagai sekumpulan orang yang memiliki pikiran irasional, emosional, kasar, barbar, dan impulsif, sehingga aksi-aksi mereka dalam massa pun mengekspresikan ciri-ciri tersebut. Orang-orang di dalam massa mengalami penularan emosi dan tingkah laku (*emotional and behavioral contagion*) sehingga sikap, perasaan, dan tingkah laku mereka tampak sama dan seragam. Ekspresi emosi dan tingkah laku mereka dengan cepat menyebar di antara mereka, sehingga manakala seseorang berteriak "serang" atau melakukan aksi-aksi menyerang, misalnya, maka secara serentak aksi

---

[2] Namun, dari sejumlah kasus yang teramati, tampak ada gejala menarik. Jika cara-cara tertentu dalam suatu demonstrasi dinilai tidak sukses, maka tidak terjadi peniruan atau penularan. Misalnya, demonstrasi atau protes yang dilakukan oleh ibu-ibu dengan cara membuka baju mereka; dan demonstrasi mahasiswa yang memberi ayam betina kepada pejabat yang oleh mereka dianggap penakut atau pengecut. Cara-cara seperti itu kini tidak lagi dilakukan karena ternyata dinilai tidak sukses dalam mencapai tujuan (tidak ada reward)

penyerangan segera dilakukan oleh segenap anggota massa. Keseragaman sikap, emosi, dan tindakan mereka merupakan ekspresi dari "jiwa kolektif" mereka. Oleh sebab itu, seorang individu normal dan bermartabat pun bisa bertingkah laku sangat kejam ketika berada di dalam suatu *mob* yang sangat kejam.

Gagasan inti dari teori LeBon ini dapat ditemukan kembali dalam penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Festinger, Zimbardo, dan Diener. Zimbardo, dkk. (2000) dan Diener (1979) menegaskan bahwa orang-orang dalam suatu kelompok (massa) mempunyai kesamaan emosi dan tingkah laku serta mampu melakukan kekerasan karena mereka mengalami deindividuasi. Deindividuasi adalah hilang atau menurunnya kesadaran diri individu, sehingga tingkah lakunya cenderung impulsif. Akan tetapi dengan adanya pengalaman deindividuasi tersebut tidak berarti bahwa jiwa individu berubah menjadi "jiwa kolektif"; yang terjadi adalah lepasnya kendali yang bersifat internal (Postmes & Spears, 1998). Jadi individu tidak lagi dapat mengendalikan emosi dan dorongan agresifnya, dan tidak merasakan takut terhadap akibat (hukuman) dari tingkah lakunya.

Menurut Postmes & Spears (1998), alasan kenapa deindividuasi bisa berpengaruh pada tingkah laku kekerasan kolektif disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, individu dalam massa gampang mengembangkan perasaan anonim; bahwa ia bukan individu unik, melainkan sebagai komponen dari suatu massa. Kedua, menjadi bagian dari massa membuat individu kurang bertanggung jawab atas tingkah lakunya yang negatif dan destruktif. Ketiga, kehadiran banyak orang dalam massa merupakan model bagi individu untuk menandingi atau menyamai aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh individu-individu lain.

Kajian Reicher (1996; 1998) memperlihatkan sedikit perbedaan dengan LeBon, Zimbardo, dan Deiner. Reicher menegaskan bahwa individu dalam *mob* atau *riot* bisa mengembangkan suatu mekanisme yang disebut identifikasi kolektif (*collective identification*). Identifikasi tersebut pada akhirnya akan mempertebal "identitas kolektif" (*collective identity salient*), meningkatkan konformitas terhadap kelompok (massa), dan mempertajam perbedaan antara *ingroup* (anggota massa) dan *outgroup* (bakal sasaran penyerangan massa). Dalam kondisi ini, individu pada dasarnya tidak kehilangan

kesadarannya atau mengalami deindividuasi, melainkan "beralih" atau berganti identitas, yakni dari *self identity* menjadi *collective identity* (Reicher, 1996) atau *mob identity*. Akibatnya, jika pikiran, emosi, atau tingkah laku baru yang berkembang dalam massa berhubungan dengan kekerasan, maka muncullah pikiran, emosi, dan tingkah laku kekerasan yang bersifat kolektif atau massal.

Teori-teori yang dikemukakan oleh sejumlah sarjana psikologi tadi sangat masuk akal dan dapat menjelaskan aksi-aksi massa yang anarkis di Indonesia. Namun, sejumlah pengamatan empiris di lapangan dan kajian dokumentasi yang saya lakukan tentang sejumlah aksi anarkis yang dilakukan oleh massa, memberi dan menambah sejumlah pemahaman baru yang belum diungkap oleh teori-teori tadi.

Temuan dari kajian dimaksud dapat menjelaskan mengapa aksi-aksi yang semula damai menjadi aksi-aksi anarkis.

- Adanya faktor pemicu. Pemicu merupakan faktor penting yang dapat menyebabkan aksi-aksi massa yang semula tidak anarkis, menjadi anarkis. Misal: aksi polisi (atau satpam) yang tidak simpatik, provokasi dari pemimpin atau (sejumlah) anggota massa itu sendiri, tututan untuk negosiasi ditolak atau diabaikan, dll. Bahkan, saat ini muncul kecenderungan untuk membenturkan massa yang satu dengan massa yang lain, yakni dengan melakukan aksi massa tandingan. Misalnya: demonstrasi menolak suatu isu dilawan oleh demonstrasi mendukung isu itu. Contoh: demonstrasi mahasiswa Pro-Reformasi dilawan oleh massa Pamswakarsa. Di banyak daerah di Indonesia dewasa ini: demonstrasi yang dilakukan oleh penentang bupati dilawan oleh demonstrasi pendukung bupati; demonstrasi menetang perda dilawan demonstrasi mendukung perda
- Keberadaan massa yang terlalu lama berada dalam kerumunan. Massa yang dibiarkan berdemonstrasi terlalu lama (sepanjang hari atau selama berhari-hari) bisa membuat mereka capek, merasa tuntutannya tidak diperhatikan, sehingga mereka marah dan terdorong untuk melakukan kekerasan[3].

---

[3] Namun, ada pengecualian tentang factor ini. Misalnya, demonstrasi yang dilakukan oleh mantan karyawan PT Dirgantara Indonesia dan oleh warga Tanggul Angin (di Sidoarjo), yang

- Semakin besar massa, semakin besar kemungkinan untuk melakukan kekerasan atau kerusuhan. Kemungkinan ini semakin besar lagi manakala kekuatan penyeimbang (dari petugas keamanan) terlalu kecil jumlahnya. Misal: demonstrasi di Kahatex Bandung (tahun. 1997); demonstrasi di Bandung menolak UU Perburuhan tahun Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 78 dan 111 Tahun 2001 (tahun 2001); dan di Senayan Jakarta menolak revisi Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) (tahun 2006).
- Perceived social role. Kemungkinan untuk melakukan atau tidak melakukan kekerasan ditentukan juga oleh kemampuan mereka untuk menyadari peran sosialnya dalam masyarakat. Jika mereka sadar akan perannya sebagai pelayan masyarakat dan harus memberi contoh baik pada masyarakat, maka kekerasan dapat dihindari. Ini tampak dari kasus-kasus demonstrasi yang dilakukan oleh para guru, *PNS, kepala desa, atau anggota DPRD. Sebaliknya, jika para anggota* massa menyadari peran sosialnya tidak berkaitan pelayanan masyarakat, sehingga tidak ada beban social (merasa *nothing to loose*) untuk melakukan kekerasan, maka kekerasan dapat terjadi.

Langkah-langkah dalam mengendalikan massa yang anarkis

Sangat tidak mudah mengendalikan aksi-aksi massa, apalagi jika sudah sampai menjadi kerusuhan yang berskala luas (riot). Kerusuhan rasial di Perancis (27 Oktober - 6 November 2005) saja baru bisa dihentikan sekitar 11 hari kemudian, karena penyebarannya makin cepat dan meluas. Demikian juga dengan kerusuhan rasial di Los Angeles pada tanggal 29 April – 4 Mei, 1992, dan kerusuhan di Jakarta pada tanggal 13-15 Mei 1998. Pengendalian massa yang sudah sangat meluas dan melibatkan banyak orang, bukan saja sangat sulit untuk dikendalikan, juga hampir selalu memakan korban jiwa dan harta yang tidak sedikit.

---

dilakukan secara relatif lama (berbulan-bulan) tidak menyebabkan mereka untuk melakukan kekerasan.

Maka, cara paling efektif untuk mengendalikan massa pada dasarnya adalah melalui cara-cara preventif, yakni mencegah agar tidak ada aksi massa yang anarkis. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan beberapa langkah berikut ini:

- Pemerintah harus sensitif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat, sebelum terjadi aksi-aksi massa. Gerakan massa merupakan ekspresi dari kekecewaan kolektif, karena adanya perceived injustice yang mereka alami. Lazimnya gerakan massa merupakan pilihan akhir yang dilakukan oleh masyarakat, jika pilihan-pilihan lain telah dilakukan tetapi selalu menemukan jalan buntu. Namun, kini menjadi pilihan pertama karena masyarakat menilai bahwa melalui aksi massa lah suara dan tuntunan mereka akan didengar oleh pemerintah.
- Jangan membuat kebijakan yang aneh atau kontroversial, misal: PP No 37 tahun 2006; Perda yang tidak aspiratif seperti di Tangerang dan Depok; UU Anti Pornografi dan Pornoaksi; UU tentang perburuhan yang menyengsarakan/-merugikan buruh
- Kesiagaan segenap komponen masyarakat, termasuk pemerintah. Contoh: pemilu 2004 dikhawatirkan rusuh, tapi karena kesiagaan dari berbagai pihak, maka tidak terjadi kerusuhan. Contoh lain: Kerusuhan yang diduga akan terjadi di Bekasi saat pilkada di kabupaten itu bulan Maret 2007, ternyata tidak terjadi karena ada antisipasi dari masyarakat setempat dan kepolisian menempatkan 3.100 anggota polisi di kabupaten itu.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z. (2005). Penghakiman Massa. Kajian atas Kasus dan Pelaku. Jakarta: Accompli

Bandura, A. (1973). *Aggression. A social learning analysis*. Englecliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc.

Barkan, S.E. & Snowden, L.L. (2001). *Collective Violence*. Boston: Allyn and Bacon.

Blumer, H. (1970). Outline of collective behavior. In Robert E. Evans, *Readings in collective behavior*. Chicago: Rand McNally & Co., p.65-88.

Chriestie, D.J., Wagner, R.V., & Winter, D.W. (eds.) (2001). *Peace, conflict, & Violence*. New Jersey: Prentice-Hall.

Colman, A.M. (1991). Crowd psychology in South African murder trials. *American Psychologist*. October, vol.46, No.10, 1071-1079.

Colombijn, Freek, (2002). *"maling, maling!" The lynching of petty criminals.* In Freek Colombijn & J. Thomas Linbald. *Roots of Violence in Indonesia. Contemporary violence in historical perspective.* Leiden: KITLV Press.

DiRenzo, G.J. (1990). *Human social behavior: Concepts and principles of sociologgy.* Forth Worth: Holt, Rinehart and Windston.

Evans, R.E. (ed.) (1970). Readings in collective behavior. Chicago: Rand Menally & Co.

Galtung, J. & Tschudi, F. (2001). "Crafting peace: On the psychology of transcend approach". In Chriestie, D.J., Wagner, R.V., & Winter, D.W. (eds.) (2001). *Peace, conflict, & Violence*. New Jersey: Prentice-Hall, p.210-222.

Gurr, T.B. (1974, fourth printing). *Why men rebel*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Hall, H.V. & Whitaker, L.C. (1999). *Collective violence. Effective strategies for assessing and interviewing in fatal group and institutional aggression.* Boca Raton: CRC Press.

Klandermans, B. (1997). *The social psychology of protest*. Oxford, England: Basil Blackwell.

Krahe, B. (2001). *The social psychology of aggression*. East Sussex: Psychology Press. Ltd.

LeBon, G. (1999). *The crowd.* (3rd printing). New Jersey:: Transaction Publishers. (Original work published 1895).

Madden, D. & Barron, P. (2002). "*Violence & Conflict Resolution in 'non-conflict' region: The case of Lampung, Indonesia*". The report for the World Bank

Milgram, S & Toch, H. (1969). "Collective behavior: Crowds and social movement", in Lindzey, G. & Aronson, E. (eds.), *The handbook of social psychology* (second edition), Massachusetts: Addison-Weshley Publ. Co.

Nitibaskara, Tb. R. (2001). *Ketika kejahatan berdaulat. Sebuah pendekatan kriminologi, hukum, dan sosiologi.* Jakarta: Peradaban.

Nordholt, HS. (2002). Geneologi kekerasan. *Jurnal demokrasi dan HAM*, Vol.2, No.1, Februari – Mei, 80-109.

Postmes, T & Spears, R. (1998). Deindividuation and antinormative behavior: Meta-analysis. *Psychological Bulletin*, vol.123, no.3, 238-259.

Reicher, S. (1996). The crowd century: reconciling practical success with theoritical failure. *British Journal of Social psychology*, 35, 535-553.

Reicher, S., Levine, R.M., & Gordijn, E. (1998). "More on deindividuation, power relations between groups and the expression of docial identity: Three studies on the effects of visibility to the in-group." *British Journal of Social psychology.* 37, 15-40.

Tajfel, H. (1982). *Social identity and intergroup relation.* London. Cambridge University Press.

Turner, J.C. & Giles, H. (eds.) (1985). *Intergroup behavior*, Oxford: Basil Blackwell Ltd.

Turner, J.C. (1999). Some current issues in research on social identity and self-categorization theory. In Ellemers, Spears, & Doosje (eds.) *Social identity, context, commitment, & content*. Massachusetts, Blackwell Publ. Inc.

Turner R.H. & Killian, L.M. (1972). *Collective behavior*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Zimbardo, P.G., Haney, C., & Banks, W.C. (1973). A Study of prisoners and guards in a simulated prisons. In P.Banyard & A.Grayson (eds.), (2000) (second edition). *Introducing Psychological Researh.* New York: Palgrave.